

Scoping Immersion sebagai Alternatif Metode Pembelajaran pada Pelatihan Sosial Kultural

Sofyan Eko Putra ^a dan Heni Kusumaningrum ^b

^a Lembaga Administrasi Negara

^b Lembaga Administrasi Negara

e-mail : a sofyan.eko@gmail.com, b henikusuma1992@gmail.com

Abstrak

Kompetensi sosial kultural merupakan salah satu standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Desakan digitalisasi yang cepat turut merubah sikap, perilaku dan pola ASN dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan kompetensi sosial kultural ASN maka diperlukan suatu metode pembelajaran yang mampu mendorong efektifitas pembelajaran agar kompetensi peserta terpenuhi. *Scoping immersion* merupakan metode baru yang menekankan pengalaman dan observasi (*experiential learning*) peserta dengan cara berkunjung ke suatu lokasi guna memahami dan merasakan konteks setempat secara mendalam. Implementasi metode dilakukan melalui tahap persiapan pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran dan tahap *outcome* pembelajaran, sehingga mampu menghasilkan *outcome* pembelajaran yang berkualitas.

Kata Kunci: *scoping immersion, social kultural, metode*

Scoping Immersion as an Alternative Learning Method in Socio-Cultural Social Training Programme

Abstract

Socio-cultural competence is one of the competency standards that must be met by Civil Servants in carrying out their duties as public servants. Digital disruption has also changed the attitudes, behavior and patterns of Civil Servants in the delivery of public services. In an effort to increase the socio-cultural competence of Civil Servants, a learning method is needed that is able to encourage learning effectiveness so that the competence of participants is fulfilled. *Scoping immersion* is a new approach that emphasizes participant observation and experiential learning by visiting a location to understand and feel the local context in depth. The implementation of the method is carried out through the learning preparation stage, the learning implementation stage and the learning outcome stage, so as to produce quality learning outcomes.

Keywords: *scoping immersion, socio-cultural, methode*

PENDAHULUAN

Disrupsi digital yang semakin cepat dan masif khususnya semenjak pandemi Covid-19 dimulai pada awal triwulan kedua tahun 2020 hingga saat ini. Digitalisasi secara perlahan juga mendorong perubahan pola tatanan sosial kultural masyarakat, seiring dengan semakin canggih dan *sophisticated* aplikasi teknologi yang digunakan oleh masyarakat. Sebagai salah satu contoh perubahan pola sosial kultural masyarakat akibat disrupsi digital adalah meningkatnya pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 63 juta orang dimana 95% diantaranya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Selain itu, Indonesia merupakan negara pengguna media sosial Instagram terbesar di Asia Pasifik dengan jumlah pengguna aktifnya mencapai 45 juta orang (Puspitarini dan Nuraeni, 2019). Media sosial mempunyai daya tarik bagi masyarakat dimana media sosial menawarkan kemudahan dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Namun di sisi lain, media sosial memiliki beberapa dampak negative seperti *hoax*, sarkasme, kata-kata tidak sopan, memaki, menghujat, memfitnah, dan cyber bullying (Febriyanti and Tutiasri, 2018; Timur, Jupriono and Hakim, 2018; Cahyanti and Sabardila, 2020; Lutfiyani, Purwanto and Anwar, 2021).

Aparatur Sipil Negara (ASN) juga bagian dari pengguna internet dan media sosial memiliki kerentanan dalam pergeseran budaya, etika, dan norma yang bisa saja tercermin dalam melakukan pelayanan publik. Dalam hal kepatuhan pelayanan publik di era digital ini, Ombudsman Republik Indonesia dalam Siaran Pers No. 061/HM.01/XII/2021 pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 telah mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Tahun 2021 pada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten. Hasilnya untuk tahun 2021 tidak ada kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang masuk ke dalam zona kepatuhan rendah atau zona merah. Namun berbeda dengan hasil dari pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten dengan total produk yang dinilai sebanyak 553 produk. Hasilnya secara keseluruhan untuk tahun 2021 ada lebih dari 50% pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten memiliki tingkat kepatuhan standar pelayanan publik pada zona kuning atau kepatuhan sedang.

Disrupsi digital, perubahan pola sosial kultural dan fenomena kualitas layanan yang masih kurang memuaskan khususnya pada instansi-instansi daerah, maka memerlukan pengembangan kompetensi sosial kultural. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditekankan bahwa ASN harus memiliki kompetensi sosial kultural, selain memiliki kompetensi manajerial dan teknis.

Kompetensi sosial kultural menurut Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang majemuk dan dibutuhkan bagi

setiap ASN untuk memahami perbedaan sosial serta budaya yang melekat pada masing-masing individu dalam kerangka efektivitas proses bisnis organisasi.

Dalam upaya mewujudkan terpenuhinya kompetensi sosial kultural ASN, maka desain program pengembangan kompetensi harus mampu menjawab kualifikasi sub kompetensi sosial kultural yaitu ASN sebagai perekat bangsa. Dalam Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan pengertian Pelatihan Sosial Kultural adalah Program peningkatan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi Kompetensi Sosial Kultural melalui proses pembelajaran secara intensif. Beberapa set kemampuan yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;
2. Mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta diantara para pemangku kepentingan itu sendiri; dan
3. Mampu menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

Sartika et al (2015) menjelaskan dimensi sosial kultural diturunkan

menjadi beberapa hal pokok yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Mengelola keragaman lingkungan budaya adalah kemampuan memahami dan menyadari adanya perbedaan budaya dan melihatnya sebagai hal yang positif, dalam bentuk implementasi manajemen kerja dengan mencegah diskriminasi dan menerapkan prinsip inklusifitas sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara efektif.
2. Membangun *network* sosial adalah kemampuan membangun interaksi sosial atau hubungan publik balik yang menghasilkan suatu proses pengaruh mempengaruhi atau individu, antara kelompok atau antar individu dan kelompok.
3. Manajemen konflik adalah kemampuan dalam mengelola konflik antar organisasi secara konstruktif.
4. Empati sosial adalah kemampuan untuk memahami perbedaan pikiran, perasaan, atau masalah berbagai kelompok sosial yang berbeda.
5. Kepekaan gender adalah kemampuan untuk mengenali dan menyadari kesenjangan akses, partisipasi publik dan manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan dalam lingkungan kerja maupun kehidupan bermasyarakat, yang secara potensial merugikan baik hal laki-laki maupun perempuan dalam konstruksi sosial kultural.
6. Kepekaan difabelitas adalah kemampuan untuk mengenali dan menyadari kebutuhan kelompok dengan keterbatasan fisik dan mental (difabel).

Gambar 1. Level Kompetensi Sosial Kultural



Sumber: Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN (Grafis Diolah)

Adapun Standar Kompetensi Sosial Kultural telah ditetapkan oleh Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN (lihat Gambar 1). Kemudian, Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pembina pendidikan dan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi pada tanggal 13 Januari 2022 telah mengeluarkan Peraturan LAN No. 1 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sosial Kultural. Peraturan tersebut tergolong baru. Pelatihan Sosial Kultural merupakan pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi sosial kultural untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier (lihat Tabel 1).

Sumber: Peraturan LAN No. 1 Tahun 2022 Tentang Pelatihan Sosial Kultural (Grafis Diolah)

Dengan set kompetensi yang disyaratkan setiap jenjang Pelatihan Sosial Kultural maka diperlukan metode pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta dalam mencapai jenjang kompetensi yang diharapkan. Menurut Abu Saman Lubis *dalam* Nuhajati dan Bachri (2017), keberhasilan suatu proses pembelajaran dipengaruhi banyak faktor, yakni: siswa/peserta, guru/pengajar, tujuan, materi, metode, sarana/alat, evaluasi, lingkungan/konteks, jenjang/struktur, pengelola pelatihan, serta kurikulum dan fasilitas pelatihan.

Metode pembelajaran yang digunakan merupakan salah satu aspek keberhasilan pelatihan. Namun dalam praktik pembelajaran pada umumnya dengan menggunakan metode ceramah. Kekurangan metode ceramah diantaranya adalah mudah menjadi verbalisme, bila terlalu lama digunakan akan menjadi bosan, dan peserta menjadi pasif sehingga menimbulkan kebosanan dalam diri peserta didik yang pada akhirnya pencapaian hasil belajar tidak optimal (Syaiful dan Aswan, 2006 *dalam* Mubtasim, 2017; Hiryanto, 2009).

Dimensi Kompetensi Sosial Kultural yang luas memerlukan metode pembelajaran yang mampu menggugah perasaan/empati peserta pelatihan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam lokus

Tabel 1. Jenjang, Kompetensi dan Kurikulum Pelatihan Sosial Kultural

Jenjang	1	2	3
Peserta	•Pelaksana •Fungsional Pemula	•Pengawas, dan Administrator •Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama •Fungsional Terampil, Mahir, dan Penyelia	•JPT Pratama, Madya, dan Utama •Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama
Kompetensi yang dikembangkan	Memahami, mengenali, dan menerima keragaman sosial kultural	Mengembangkan dan mempromosikan keragaman sosial kultural	Mewujudkan lingkungan yang produktif di tengah keragaman sosial kultural
Kurikulum dan JP (Jam Pelajaran)	•Mata Pelatihan Generik (15 JP) •Mata Pelatihan Muatan Lokal (40 JP)	•Mata Pelatihan Generik (33 JP) •Mata Pelatihan Muatan Lokal (40 JP)	•Mata Pelatihan Generik (23 JP)

Keterangan: Mata Pelatihan Muatan Lokal, meliputi: Ceramah (20 JP), Aktualisasi (15 JP), Sesi berbagi (5 JP)

yang dikunjungi sehingga peserta mendapat *insight* dan menghasilkan rumusan kebijakan/solusi yang solutif sebagai *outcome* pembelajaran. Berangkat dari hal tersebut, rumusan yang akan dikaji dalam tulisan ini mencakup dua hal, pertama, mengenai bagaimana metode *Scoping Immersion* dapat digunakan dalam Pelatihan Sosial Kultural, kedua, bagaimana tahapan pelaksanaan metode *Scoping Immersion*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan *Scoping Immersion* sebagai metode pembelajaran alternatif yang bisa diterapkan kepada peserta agar dapat merasakan pengalaman secara langsung. Sehingga diharapkan manfaat penelitian ini adalah memberikan referensi alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam Pelatihan Sosial Kultural.

PLA, RRA, dan *Scoping Immersion*

R. Djohani, Dwi Joko W., Riza Irfani (2007) memberikan definisi *Participatory Learning and Action* (PLA) sebagai metodologi pembangunan atau pengembangan masyarakat yang mengadopsi konsep pembelajaran masyarakat. Metodologi ini digunakan pada studi dan teknik pemberdayaan masyarakat yang merupakan pengembangan metodologi *Rural Rapid Appraisal* (RRA) di era tahun 1980-an.

R. Chambers (1994) menjelaskan ada perbedaan antara RRA dan PLA, yaitu RRA dimaksudkan untuk dipelajari oleh orang luar (bukan masyarakat lokal), sedangkan PLA dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat lokal agar mampu melakukan analisis sendiri, dan sering kali digunakan untuk merencanakan dan mengambil tindakan (lihat Tabel 1).

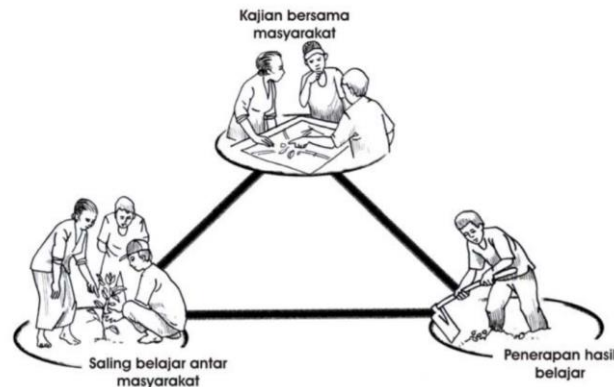
Aminah, S. (2000); 'Alin F.S. (2017); Zulfaiddi Z., R. Irvan, S., Nur K.

(2018) menjelaskan prinsip-prinsip tambahan yang perlu ditekankan PLA dibandingkan RRA yaitu:

1. Saling berbagi informasi, pengalaman, pelatihan dan gagasan antara masyarakat desa, antara masyarakat dengan fasilitator, dan antar organisasi yang berbeda.
2. Memfasilitasi masyarakat untuk menyelidiki, menganalisis, dan meningkatkan pemahaman oleh masyarakat itu sendiri tentang isu yang dihadapi. Pada gilirannya masyarakat akan mampu mengatasi sendiri persoalannya.
3. Difasilitasi oleh ahli dan stakeholder yang bertindak sebagai katalisator dan fasilitator dalam pengambil keputusan dan (jika diperlukan) mereka akan meneruskannya kepada pengambil keputusan.
4. Pemimpin perubahan, dalam arti bahwa keputusan yang diambil melalui PLA akan dijadikan acuan bagi perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Dadan D., Ila R. (2020) dalam penelitiannya *Participatory Learning and Action* (PLA) pada Kelompok Keluarga Harapan di Kota Serang menjelaskan bahwa PLA merupakan belajar dan praktik secara partisipatif merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai "*learning by doing*" atau belajar sambil bekerja yang terdiri dari proses belajar melalui: ceramah, curah pendapat, diskusi dll. Jo Abbot (1999) menjelaskan PLA menerapkan prinsip pemantauan dan evaluasi partisipatif yang mewakili berbagai tujuan, konteks organisasi, pendekatan dan metode.

Gambar 2 Metode *Participatory Learning and Action* (PLA)



Sumber: R. Djohani, Dwi Joko W., Riza Irfani, 2007

Secara teknis mengunjungi lokus dengan proses observasi dan melibatkan masyarakat dalam metode *Scoping Immersion* serupa dengan metode *Participatory Learning and Action* (PLA) dimana dalam konsep pembelajaran PLA dimaksudkan agar masyarakat lokal mampu menganalisis, merencanakan, hingga mengambil tindakan secara mandiri dengan didampingi oleh fasilitator yang secara efektif dimulai dari pembelajaran bersama masyarakat lokal, saling belajar antara masyarakat lokal hingga penerapan hasil belajar (Lihat Gambar 2). Sedangkan pada metode *Scoping Immersion* tidak melakukan tahap penerapan hasil belajar, tetapi menyusun rekomendasi kebijakan dari hasil observasi.

Lebih lanjut, dalam penelusuran penulis tidak banyak literatur yang membahas mengenai istilah *Scoping Immersion*. Metode pembelajaran dengan phrasa tersebut pertama kali dikenalkan dalam pelatihan-pelatihan di lingkungan Pusbangkom TSK ASN Lembaga Administrasi Negara yang bekerja sama dengan *Global Green Growth Institute* (GGGI) Indonesia. Yulia S., Meuthia A.N, Mariski N. (2020) menjelaskan definisi *Scoping Immersion* merupakan sebuah metode pembelajaran berdasarkan pengalaman dan observasi (*experiential education*) yang dilakukan dengan cara berkunjung ke suatu lokasi guna

memahami dan merasakan konteks setempat secara mendalam. *Scoping Immersion* dilakukan dengan cara berkunjung ke suatu lokasi guna memahami, merasakan/menghayati secara langsung konteks setempat dengan mendalam melalui observasi peserta dan percakapan informal dengan masyarakat setempat.

Adapun dalam metode *Scoping Immersion*, peran fasilitator dilakukan oleh peserta pelatihan yang sifatnya tidak hanya berperan sebagai observer namun juga dituntut untuk mampu merasakan atau berempati terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat (target lokus). Newton, C. (2021) berbagi pengalamannya mengenai Pembelajaran Imersif (*immersive learning*) dimana periode pembelajaran yang lama 3 (tiga) tahun memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa dan berlapis tentang tindakan dan keputusan 'orang/masyarakat dan lembaga/organisasi' dibandingkan dengan penelitian konvensional dimana peneliti hanya mengumpulkan informasi dan pengetahuan dalam waktu yang terbatas dan mengandalkan "informasi masa lalu" dari responden/aktor/tokoh kunci di masyarakat. Sedangkan, Birch dan Catani (2007) berpendapat bahwa *immersion* (pengalaman belajar tentang suatu masalah secara tatap muka) harus dapat menemukan suatu cara yang lebih kreatif agar mamapu menghimpun aspirasi/ide/gagasan

para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dalam lingkungan

target lokus sekaligus mampu menjawab permasalahan tersebut.

Tabel 2. Perbedaan Metodologi RRA, PLAA, dan *Scoping Immersions*

Uraian	RRA	PLA	<i>Scoping Immersions</i>
Era Pengembangan	Akhir 1970, 1980	Akhir 1980, 1990	Awal 2020
Input Informasi	Pengetahuan masyarakat lokal	Kemampuan analitis masyarakat lokal	Kemampuan analitis masyarakat lokal
Inovasi	Metode, <i>Team Management</i>	Perilaku dan <i>Experiential Training</i>	Empati dan <i>Experiential Learning</i>
Teknik	Penggalan informasi	Fasilitasi partisipatif	Observasi (<i>River of Life</i>)
Waktu	≥ 6 bulan	≥ 6 bulan	≤ 1 hari
Tujuan	Belajar dari orang luar (objek)	Pemberdayaan orang lokal (subjek)	Gagasan/Solusi
<i>Outcome</i>	Perencanaan dan Publikasi Proyek	Keberlanjutan program masyarakat	Rancangan Kebijakan

Sumber: R. Chambers, 1994; Penulis, 2022 (dengan modifikasi)

Pada Tabel 2, dijelaskan bahwa ketiga metodologi diatas memiliki objek penggalan informasi yang sama yaitu informasi/pengetahuan masyarakat lokal namun menggunakan teknik penggalan informasi yang berbeda, kemudian perbedaan yang signifikan adalah waktu pelaksanaan *scoping immersion* lebih ringkas kurang dari 1 (satu) hari, sedangkan RRA dan PLA pelaksanaannya dilakukan minimal dalam waktu 6 (enam) bulan.

Dalam implementasi metode *Scoping immersion* diharapkan dapat menghasilkan sebuah rancangan kebijakan yang didapatkan dari hasil observasi mendalam, empati yang dibangun selama observasi oleh peserta pelatihan di suatu lokus/kelompok masyarakat, sehingga peserta mendapatkan pengalaman pembelajaran (*experiential learning*) yang komprehensif. Selain itu, diharapkan peserta pelatihan yang terlibat adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas pengetahuan, dan memiliki kewenangan terkait permasalahan masyarakat, serta memiliki peran dalam keputusan kebijakan publik, sehingga mampu menghasilkan *outcome* pembelajaran yang berkualitas.

METODE

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan metode pembelajaran *scoping immersion* melalui data-data pendukung yang bersumber dari jurnal penelitian dan buku penunjang. Selain itu, peneliti mengumpulkan data sekunder dari laporan penyelenggaraan Pelatihan Revolusi Mental yang diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK ASN, dan Sarasehan Kepemimpinan Berempati yang diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK ASN bekerjasama dengan GGGI Indonesia, dimana 2 (dua) salah satu mata pelatihan/kegiatannya menggunakan metode pembelajaran *scoping immersion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Persiapan Pembelajaran *Scoping Immersion*

Tahapan *scoping immersion* dimulai dengan persiapan (*briefing*). Dalam *scoping immersion*, peserta pelatihan akan bertemu dan

berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk memahami dan merasakan dampak kebijakan dari perspektif masyarakat. Agar peserta mendapatkan hasil terbaik, maka penyelenggara dan pengajar berkolaborasi dalam penyusunan panduan pelaksanaan *scoping immersion*. Panduan bertujuan untuk mempermudah peserta pelatihan dalam melakukan *scoping immersion*.

Pada tahapan ini, panduan harus memuat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil *scoping immersion*, antara lain:

- a. Jarak kekuasaan
Jarak kekuasaan menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pola interaksi antara peserta dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan *scoping immersion*, peserta pelatihan harus menempatkan diri mereka sebagai "orang biasa" atau masyarakat umum bukan sebagai "orang penting". Penempatan diri sebagai masyarakat ini bertujuan agar peserta dapat benar-benar memahami dan merasakan dampak dari kebijakan pemerintah.
- b. Mendengarkan secara aktif
Kemampuan mendengarkan secara aktif menjadi faktor penting dalam menentukan hasil *scoping immersion*. Kemampuan mendengarkan secara aktif atau *active listening* adalah keterampilan mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Peserta tidak boleh memancing masyarakat dengan kalimat-kalimat yang dapat menggiring opini yang tidak sesuai.
- c. Etika dan protokol
Dalam panduan juga dijelaskan tentang etika dan protokol dalam pelaksanaan *scoping immersion*. Etika yang perlu diperhatikan antara lain:

a) Kompensasi

Dalam pelaksanaan *scoping immersion*, percakapan dan interaksi yang terjadi antara peserta dengan masyarakat dilakukan sealam mungkin. Jika tidak dilakukan secara alami, maka akan muncul harapan-harapan masyarakat, misalnya kompensasi material.

b) Perlindungan terhadap anak di bawah umur

Anak-anak di bawah umur 18 tahun merupakan kelompok rentan yang masih belum menjadi bagian dari subjek hukum. Anak-anak di bawah umur masih memiliki pengetahuan yang terbatas sehingga belum dapat menganalisis dampak dari suatu keputusan. Dalam pelaksanaan *scoping immersion*, jika peserta berinteraksi dengan anak usia di bawah umur, maka perlu ada ijin dan konsultasi dengan orang tuanya.

c) Persetujuan dan intervensi

Pada pelaksanaan *scoping immersion*, jika peserta akan mengambil foto atau video harus mendapatkan ijin dari orang yang bersangkutan.

d) Protokol *scoping immersion*

Protokol atau tata cara *scoping immersion* seperti peserta harus menyediakan P3K dan obat-obatan pribadi, koor-dinasi dengan fasilitator pendamping, dan kartu identitas.

Tahap Pelaksanaan Pembelajaran *Scoping Immersion*

Tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran *scoping immersion*. *Scoping immersion* dilaksanakan kurang dari 1 (satu) hari yaitu $\pm$ 5 jam pelajaran dan dilanjutkan

dengan refleksi *scoping immersion* (*debriefing*). Tahap pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan pada lokus pilihan penyelenggara dan pengajar. Lokus ini dipilih sesuai dengan tema dan tujuan pelatihan sosial kultural yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta melakukan observasi ke lokus yang sudah ditentukan, kemudian setelahnya peserta diharuskan membuat laporan hasil observasi dalam bentuk *river of life* (lihat Gambar 3). Ilustrasi *river of life* mempermudah peserta dalam mendeskripsikan dan menjelaskan isu strategis dan gambaran kompleksitas suatu permasalahan di target lokus.

Karnieli-Miller et al., 2009; Packard, 2008 dalam Denov, Myriam & Shevell, Meaghan (2021) penggunaan ilustrasi *River of life*, peserta tidak hanya bebas memilih cara dalam

menggambar pengalaman mereka, tetapi juga apa yang harus digambar. Peserta memiliki wewenang untuk menentukan apa yang harus dimasukkan dan ditinggalkan, juga sebagai mana untuk memulai dan di mana untuk mengakhiri. Selain itu, Teknik ini dapat juga disesuaikan dengan budaya dan konteks dimana penelitian itu berlangsung.

Moussa, Ziad (2009) teknik *river of life* juga membantu kelompok untuk 'mengikat' dengan cepat sehingga teknik ini dapat dilakukan dengan variasi lain yaitu saat ketika peserta menjadi bagian dari sebuah tim atau berkelompok, masing-masing anggota tim dapat diminta untuk menggambar *river of life* secara paralel kemudian membuat satu kesatuan *river of life* besar yang mewakili kelompok tersebut.

Gambar 3. Kegiatan Penyusunan Ilustrasi “River of Life”



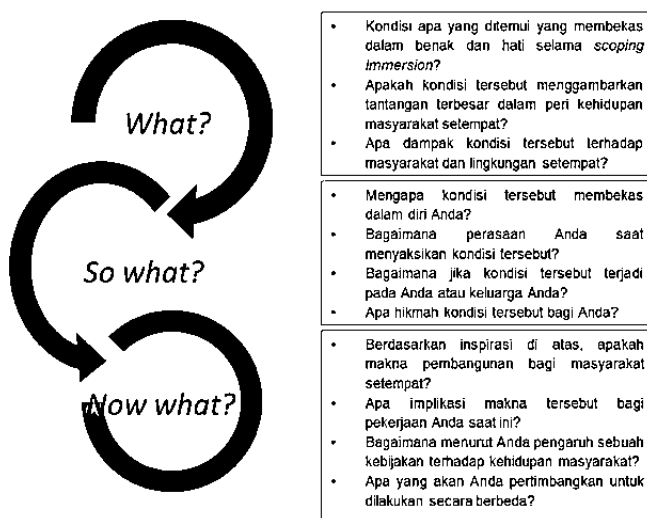
Sumber: Gambar (a) Moussa, Ziad (2009)
Gambar (b), dan (c) Pusbangkom TSK ASN, 2022

Setelah menyelesaikan ilustrasi *river of life* kemudian dilanjutkan dengan kegiatan refleksi pribadi atau *debriefing* dengan kalimat tanya: *What?*, *So What?*, dan *Now What?* Sebagaimana yang dijelaskan pada Gambar 4 dimana peserta didorong agar mampu menjelaskan dan mendeskripsikan hasil *river of life*. Yulia S., Meuthia A.N, Mariski N. (2020) memberikan contoh pertanyaan refleksi dalam proses *debriefing*, yaitu:

1. Pertanyaan “What?”, diantaranya: Kondisi apa yang membekas dalam benak dan hati selama *scoping immersion*?; Apakah kondisi tersebut menggambarkan tantangan terbesar dalam peri kehidupan masyarakat setempat?; Apa dampak kondisi tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan setempat?

2. Pertanyaan “*So What?*”, diantaranya: Mengapa kondisi tersebut membekas dalam diri anda?; Bagaimana perasaan anda saat menyaksikan kondisi tersebut?; Bagaimana jika kondisi tersebut terjadi pada anda atau keluarga anda?; Apa hikmah kondisi tersebut bagi anda?
3. Pertanyaan “*Now What?*”, Berdasarkan inspirasi diatas, apakah makna pembangunan bagi masyarakat setempat?; Apa implikasi makna tersebut bagi pekerjaan anda saat ini?; Bagaimana menurut anda pengaruh sebuah kebijakan terhadap kehidupan masyarakat?; Apa yang akan anda pertimbangkan untuk dilakukan secara berbeda?

Gambar 4. Model Debriefing berdasarkan Refleksi Pribadi “*River of Life*”



Sumber: Yulia S., Meuthia A.N, Mariski N. (2020)

Tahap Outcome Pembelajaran *Scoping Immersion*

Pada tahap *outcome* pembelajaran, Hasil ilustrasi *river of life* dan proses *debriefing* pada tahap sebelumnya kemudian diterjemahkan kembali oleh peserta dalam bentuk rincian isu-isu strategis yang ada di

masyarakat, dampak kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan saat ini, serta menyusun dan memaparkan risalah kebijakan dalam membantu menyelesaikan masalah isu strategis yang tengah dialami oleh masyarakat yang menjadi target lokus.

Muatan risalah kebijakan yang merupakan *outcome* pembelajaran *scoping immersion* seyogyanya tidak memiliki format baku karena setiap peserta memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda. Namun sebagai salah satu acuan menyusun risalah kebijakan dapat mengikuti format risalah kebijakan berdasarkan Peraturan LAN No. 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan. Risalah kebijakan adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan. Risalah kebijakan memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi, maksudnya adalah tidak hanya memberikan sebuah rekomendasi terpilih namun juga memberikan pilihan terhadap sebuah solusi tertentu. Muatan dalam risalah kebijakan diantaranya adalah menjelaskan isu/masalah, konteks, stakeholders, cakupan dan dampak. Selain itu juga, mengeksplorasi berbagai penyebab masalah, hubungan antar berbagai isu terkait, serta mengidentifikasi implikasi temuan-temuan dalam analisis terhadap aktor-aktor kunci.

Metode Pembelajaran *Scoping Immersion* dalam Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural

Kompetensi sosial kultural wajib dimiliki oleh setiap ASN. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat;

kemampuan menjadi perpanjangan tangan pemerintah; dan kemampuan dalam menjaga dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan. Metode pembelajaran *scoping immersion* dinilai dapat menumbuhkan kemampuan sosial kultural tersebut.

Metode *scoping immersion* bertujuan untuk membangun empati peserta ketika sedang menggunakan layanan publik bersama dengan masyarakat/*stakeholder* lainnya. Empati adalah kemampuan untuk memahami perbedaan pikiran, perasaan, atau masalah berbagai kelompok sosial yang berbeda. Membangun empati ini bertujuan agar peserta, yaitu ASN dapat merasakan sebagai customer layanan publik. Empati ini dapat meningkatkan kepekaan peserta jika berada di posisi customer yang menggunakan layanan publik. Setelah rasa empati terbangun, harapannya peserta dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menilai kebijakan pemerintah apakah efektif dan efisien atau tidak.

Metode Pembelajaran Scoping Immersion dalam Situasi Pandemi Covid-19

Metode pembelajaran *scoping immersion* pernah dilakukan oleh Pusbangkom TSK ASN LAN dalam Pelatihan Revolusi Mental. Sesuai dengan Surat Edaran Kepala LAN No. 11/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Covid-19 dalam Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Sosial Kultural, Pelatihan Revolusi Mental diselenggarakan secara daring, termasuk pembelajaran *scoping immersion*.

Pelaksanaan *scoping immersion* secara daring ini sedikit berbeda dengan pelaksanaan secara klasikal/ tatap muka langsung. Jika secara klasikal/ tatap muka, peserta dapat berinteraksi secara langsung dengan

masyarakat lainnya yang sedang menggunakan layanan publik dan bertemu langsung dengan pemberi layanan, sedangkan *scoping immersion* secara daring, peserta menggunakan layanan publik yang menggunakan teknologi digital seperti layanan perpanjangan SIM, layanan pembuatan passport, layanan pembuatan KTP, dan lain sebagainya. Dalam *scoping immersion* secara daring ini, peserta berperan sebagai masyarakat/ customer yang ingin mendapatkan layanan tersebut sehingga mulai dari pendaftaran hingga proses dilayani, bahkan menelepon *customer service* dilakukan oleh peserta. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana penyedia layanan publik memberikan pelayanan bagi masyarakat/ customer secara tidak langsung. Pemilihan layanan digital sebagai lokus dari *scoping immersion*, selain dampak dari pandemi juga karena pemerintah sudah mulai menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana sebagian besar layanan publik dapat diakses melalui elektronik. Penggunaan metode pembelajaran *scoping immersion* melalui daring tentunya akan berbeda dengan pelaksanaan klasikal/ tatap muka, namun tujuan dari *scoping immersion* sendiri masih diperoleh oleh peserta pelatihan.

PENUTUP

Metode pembelajaran dengan metode *Scoping Immersion* dapat digunakan dalam Pelatihan Sosial Kultural, karena desain pembelajaran mendorong peserta melakukan pengamatan yang rinci, juga empati yang dibangun selama observasi terhadap kelompok lokal/masyarakat sehingga mampu memberikan pengalaman belajar yang lengkap. Selain itu, peserta diharapkan dapat berperan dalam pengambilan kebijakan

untuk mencapai hasil pembelajaran yang berkualitas.

Dalam penyelenggaraan metode pembelajaran *Scoping Immersion*, dilakukan dalam tiga tahap yaitu: Tahap Persiapan Pembelajaran, Tahap Pelaksanaan Pembelajaran dan Tahap *Outcome* Pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan agar memudahkan peserta dalam merasakan pengalaman secara langsung dengan terjun ke masyarakat di desa terpencil/ target lokus dan menghasilkan *outcome* pembelajaran yang berkualitas.

Dalam penulisan ilmiah ini memiliki keterbatasan yaitu tidak melakukan penggalan data primer wawancara dengan tenaga pengajar/fasilitator dan peserta pelatihan yang pernah menggunakan metode *Scoping Immersion*. Sebagai pengembangan penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan survei primer untuk mendukung hasil penelusuran ilmiah dari studi literatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. (2000). Metode PRA dan RRA. Prosiding Pelatihan untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Institut Pertanian Bogor. Diakses melalui: https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/25074/1/Prosiding_pengelolaan_wilayah_pesisir_terpadu-12.pdf
- Alin F.S. (2017). Participatory Learning And Action (PLA) di Desa Terpencil Peran LSM PROVISI Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatra Selatan. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan Vol. 1, no. 1, hal. 83-102, doi: 10.14421/jpm.2017.011-05
- Anwar, Fahmi. (2017). Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Vol 1, No 1 hlm 137-144
- Cahyanti, A. S. and Sabardila, A. (2020) 'Analisis Penggunaan Kalimat Sarkasme oleh Netizen di Media Sosial Instagram', *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 4(2), pp. 186-195. doi: <http://dx.doi.org/10.30651/lf.v4i2.5094>.
- Dadan D., Ila R. (2020). Participatory Learning And Action (PLA) Pada Kelompok Keluarga Harapan Di Kota Serang. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Vol. 3, No.1.
- Denov, Myriam & Shevell, Meaghan. (2021). An Arts-Based Approach With Youth Born Of Genocidal Rape In Rwanda: The River Of Life As An Autobiographical Mapping Tool. *Global Studies of Childhood* Vol. 11(1) 21-39.
- Dinamika Data Aplikasi Informatika Tahun 2019. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jakarta; diakses melalui: <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/files/Dinamika%20Data%20Aptika%202019.pdf>
- Febriyanti, S. N. and Tutiasri, R. P. (2018) 'Etika Komunikasi Netizen Di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Terhadap Etika Berkomunikasi Netizen Dalam Menerima Berita dan Informasi Pada Halaman Facebook E100 Radio Suara Surabaya)', *Jurnal Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jatim*, 1(1).
- Hiryanto (2009). Optimalisasi Penerapan Konsep Andragogi dalam Pendidikan dan Latihan Aparatur Pemerintah Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Lulusan. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF - Vol. 4, No.2, Desember 2009*, diakses melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/260080-optimalisasi-penerapan-konsep-andragogi-e70d0038.pdf>
- Izzy Birch Raffaella Catani Robert Chambers. (2007). Immersions: learning about poverty face-to-face. *Journal Participation Learning and Action* ed. 57. International Institute for Environment and Development,. Diakses melalui: <https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/14558IIED.pdf>

Jo Abbot. (1999). Beyond Tools And Methods: Reviewing Developments In Participatory Learning And Action. *Environment and Urbanization*, Vol. 11, No. 1, April.

Lutfiyani, S., Purwanto, B. E. and Anwar, S. (2021) 'Sarkasme Pada Media Sosial Twitter dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA', *Tabasa : Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya*, 1(2).

Mubtasim, Ahmad. (2017). Penerapan Pendekatan Andragogi Melalui Metode Demonstrasi Pada Pembelajaran Life Skill Menjahit Program Paket C Di UPTD SKB Susukan Kabupaten Semarang. Skripsi. Universitas Negeri Semarang

Moussa, Ziad. (2009). Participatory Learning and Action 60: Community-Based Adaptation To Climate. December 2009. <https://www.iied.org/pla-60-community-based-adaptation-climate-change>

Newton, C. (2021). The Role of Government Initiated Urban Planning Experiments in Transition Processes and Their Contribution to Change at the Regime Level. *Sustainability* 2021, 13, 2419. <https://doi.org/10.3390/su13052419>

Robert Chambers. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, Vol. 22 No. 7, pp.953-969, Elsevier Science Ltd. Diakses melalui tautan: https://entwicklungspolitik.uni-hohenheim.de/uploads/media/Day_4_-_Reading_text_8.pdf

R. Djohani, Dwi Joko W., Riza Irfani. (2007). Panduan Untuk Fasilitator Infomobilisasi Teknik Fasilitasi Partisipatif Pendampingan Masyarakat. Tim Partnerships for e-Prosperity for the Poor. BAPPENAS-UNDP
Yulia S., Meuthia A.N, Mariski N. (2020) Modul I: Kepemimpinan Berempati Dalam Tantangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Global Green Growth Institute (GGGI). Jakarta.

Zulfaidi Zakaria, R Irvan Sophian, Nur Kholifah. (2018). Modifikasi Konsep Participatory Rural Appraisal Untuk

Pembekalan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa di Jawa Barat, Indonesia. *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* Vol. 7, No. 1, Maret 2018: 38 - 45

Regulasi

Permenpan RB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN

Peraturan LAN No. 1 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sosial Kultural

Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan LAN No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Revolusi Mental Angkatan I s.d IV Tahun 2021. Pusbangkom TSK ASN. LAN: Jakarta

Siaran Pers No. 061/HM.01/XII/2021 Tanggal Rabu, 29 Desember 2021. Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/news/r/anugerah-kepatuhan-standar-pelayanan-publik-tahun-2021-presiden-jokowi-tidak-ada-toleransi-bagi-pelayanan-lambat>

